



BUPATI WONOSOBO

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
PADA ACARA
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOSOBO
TERHADAP RENCANA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN
2024
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
RABU, 7 AGUSTUS 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Yang saya hormati:

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;

- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada hari ini, Rabu, 7 Agustus 2024, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, dalam rangkaian pembahasan rencana Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo, yang telah memberikan pandangan umumnya terhadap rencana Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal, terkait dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rencana Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2024, sebagai berikut :

A. Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024, program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Sektor Pertanian, melalui:
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, guna memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjaga stabilitas harga pangan;
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pertanian;
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, untuk meningkatkan produksi dalam pengelolaan pertanian perlu didukung dengan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Sektor Tenaga Kerja dan Perindustrian, melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan sektor unggulan daerah, memperluas jangkauan pemasaran produk-produk lokal melalui teknologi digital *marketing*, serta penggunaan mesin modern untuk meningkatkan kualitas kemasan produk industri pengolahan.

3. Sektor Pariwisata, melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan destinasi pariwisata prioritas sebagai daya tarik pariwisata selain Kawasan Dieng. Peningkatan jumlah wisatawan diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari jasa makan minum dan akomodasi (warung, restoran, penginapan, perdagangan eceran).
4. Sektor UMKM, melalui Program Pengembangan UMKM dan Pemberdayaan UMKM, serta berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM, melalui program-program pelatihan serta fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi Halal, sehingga produk-produk UMKM lokal dapat diterima secara luas dan dapat dipasarkan di tingkat regional-nasional.

Kolaborasi dari 4 (empat) program tersebut bermuara pada meningkatkan produktivitas barang dan jasa dari aktivitas pertanian, perdagangan, industri pengolahan, makan minum, dan jasa akomodasi, dimana semuanya adalah sektor-sektor utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi nilai PDRB mencerminkan semakin besar pula pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah.

Disisi lain, terdapat beberapa indikator pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang belum tercapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, antara lain :

1. Persentase usaha mikro naik kelas, realisasi capaian triwulan IV Tahun 2023 sebesar **18,68 persen**. Hal ini disebabkan karena kriteria usaha mikro, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, harus memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak **1 Miliar Rupiah**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan persentase usaha mikro naik kelas, yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas dan produktivitas UKM melalui penyediaan skema pendanaan dan pemasaran;
 - b. Pengembangan klinik bisnis/inkubator bisnis menjadi UMKM *center*/PLUT (Pusat Usaha Layanan Terpadu);
 - c. Mengembangkan skema pelatihan prioritas pada substansi produksi dan pemasaran;
 - d. Fasilitasi sertifikasi usaha (BPOM, PIRT, sertifikasi halal, HAKI).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi capaian triwulan IV Tahun 2023 sebesar **76,25 persen**.

Strategi yang dilakukan untuk menurunkan TPT di Kabupaten Wonosobo yaitu :

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan prioritas pada perluasan BLK komunitas;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan.

B. Pendapatan Daerah

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, potensi penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi akan meningkat, karena terdapat sektor-sektor yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak, dengan adanya regulasi baru menjadi objek pajak. Selain itu dengan ditetapkannya tarif baru maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD, antara lain dengan intensifikasi pajak melalui pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan melalui sosialisasi dan penambahan wajib pajak baru.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pendataan terhadap objek pajak baru, dan perbaruan data terhadap objek pajak yang sudah terdaftar untuk melihat kondisi terkini, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PAD.

Adanya peningkatan yang cukup besar pada retribusi daerah hingga mencapai **858,37 persen**, sebenarnya hanya pergeseran dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada pos pendapatan BLUD rumah sakit dan puskesmas menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD rumah sakit dan puskesmas tersebut, diharapkan dapat digunakan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh rumah sakit dan puskesmas, dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Wonosobo, pada Perubahan APBD 2024, terdapat peningkatan deviden yang akan disetorkan pada tahun 2024 sesuai hasil RUPS, antara lain :

1. Bank Wonosobo, dari target sebesar **3 Miliar 055 Juta 891 Ribu 526 Rupiah**, pada penetapan APBD 2024 dapat menyetorkan deviden sebesar **3 Miliar 725 Juta 871 Ribu 354 Rupiah**, atau naik sebesar **669 Juta 979 Ribu 829 Rupiah**.

2. Bank Jateng, dari target sebesar **11 Miliar 498 Juta 546 Ribu 261 Rupiah**, pada penetapan APBD 2024 dapat menyetorkan deviden sebesar **12 Miliar 850 Juta 091 Ribu 079 Rupiah**, atau naik sebesar **1 Miliar 351 Juta 544 Ribu 818 Rupiah**.
3. BPR BKK Wonosobo, dari target sebesar **453 Juta 388 Ribu 320 Rupiah**, pada penetapan APBD 2024 dapat menyetorkan deviden sebesar **794 Juta 208 Ribu 926 Rupiah**, atau naik sebesar **340 Juta 820 Ribu 606 Rupiah**.
4. PDAM Tirta Aji, dari target sebesar **5 Miliar 552 Juta 472 Ribu 422 Rupiah**, pada penetapan APBD 2024 dapat menyetorkan deviden sebesar **7 Miliar 434 Juta 282 Ribu 880 Rupiah**, atau naik sebesar **1 Miliar 881 Juta 810 Ribu 458 Rupiah**.

C. Belanja Daerah

Sebagaimana pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, terkait kenaikan belanja operasi pada Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan tersebut antara lain :

1. Belanja Pegawai naik sebesar **22 Miliar 250 Juta 016 Ribu 520 Rupiah**, terdiri dari:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN naik sebesar **11 Miliar 748 Juta 170 Ribu 750 Rupiah**;
 - b. Asuransi ASN naik sebesar **650 Juta Rupiah**;

- c. Tambahan Penghasilan ASN turun sebesar **1 Miliar 288 Juta 908 Ribu 159 Rupiah**;
 - d. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bulan Desember Tahun 2023 yang belum terbayar sebesar **11 Miliar 064 Juta 708 Ribu 803 Rupiah**. Pada tahun anggaran 2023 baru teranggarkan sebanyak 12 bulan, namun ditengah perjalanan tahun anggaran, sebagian anggaran tersebut, yaitu anggaran TPG bulan Desember 2023, digunakan sementara untuk membayar TPG 13 dan TPG 14, hingga menunggu penggantian dari Pemerintah Pusat;
 - e. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) naik sebesar **76 Juta 045 Ribu 126 Rupiah**.
2. Belanja Barang dan Jasa naik sebesar **58 Miliar 704 Juta 636 Ribu 903 Rupiah**, terdiri dari :
- a. Kenaikan belanja BLUD rumah sakit dan puskesmas yang berasal SiLPA dan kenaikan target pendapatan sebesar **20 Miliar 965 Juta 526 Ribu 724 Rupiah**;
 - b. Kenaikan belanja sumber dana DBH-CHT yang berasal dari SiLPA dan kenaikan pendapatan sebesar **2 Miliar 517 Juta 776 Ribu 272 Rupiah**;
 - c. Penggunaan SiLPA DAU kesehatan sebesar **2 Miliar 136 Juta 925 Ribu 968 Rupiah**;

- d. Penggunaan SiLPA Insentif Fiskal sebesar **481 Juta 761 Ribu 882 Rupiah.**
- e. Kenaikan belanja barang dan jasa SKPD **32 Miliar 717 Juta 378 Ribu 257 Rupiah.**
- f. Penurunan belanja BOS Satuan Pendidikan sebesar **114 Juta 732 Ribu 200 Rupiah.**

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023

SiLPA yang semula direncanakan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan SiLPA bebas atau penggunaannya tidak dibatasi untuk program atau kegiatan tertentu. Adapun penetapan SiLPA pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan Desember 2023, sebesar **28 Miliar 620 Juta 530 Ribu 749 Rupiah.**

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit BPK, nilai SiLPA sebesar **98 Miliar 025 Juta 712 Ribu 618 Rupiah.** SiLPA tersebut terdiri dari SiLPA yang dibatasi penggunaannya dan SiLPA yang bebas penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. SiLPA pada kas BLUD dan kas Satuan Pendidikan sebesar **14 Miliar 521 Juta 212 Ribu 188 Rupiah;**
- b. SiLPA dana-dana khusus sebesar **69 Miliar 505 Juta 314 Ribu 919 Rupiah;**
- c. SiLPA yang penggunaannya bebas sebesar **13 Miliar 999 Juta 185 Ribu 578 Rupiah.**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024, perlu kami sampaikan bahwa realisasi anggaran sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar **1 Triliun 067 Miliar 686 Juta 344 Ribu 446 Rupiah**, atau **51,42 persen** dari anggaran Penetapan APBD, yang terdiri dari Realisasi PAD sebesar **134 Miliar 320 Juta 745 Ribu 848 Rupiah** atau **46,03 persen**, Realisasi Pendapatan transfer sebesar **925 Miliar 839 Juta 823 Ribu 883 Rupiah** atau **52,20 persen**, dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar **7 Miliar 525 Juta 774 Ribu 715 Rupiah** atau **67,90 persen**.
- b. Realisasi Belanja Daerah sebesar **817 Miliar 134 Juta 284 Ribu 754 Rupiah** atau **47,65 persen**, yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar **789 Miliar 268 Juta 193 Ribu 730 Rupiah** atau **50,65 persen**, Realisasi Belanja Modal sebesar **27 Miliar 866 Juta 091 Ribu 024 Rupiah** atau **12,18 persen**, Realisasi Belanja Transfer sebesar **191 Miliar 519 Juta 585 Ribu 228 Rupiah** atau **48,44 persen**.

Progres pengadaan barang dan jasa sampai saat ini dapat kami jelaskan bahwa :

- a. Pengadaan Barang mencapai **41,62 persen**;
- b. Pengadaan Jasa Lainnya mencapai **10,21 persen**;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi mencapai **0,72 persen**;

d. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mencapai **47,45 persen**.

Dengan melihat sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan berupaya melakukan percepatan agar anggaran dapat terserap secara maksimal.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, atas segala saran dan masukan maupun koreksi terhadap rencana Perubahan APBD Tahun 2024, baik terkait upaya pencapaian target pendapatan 2024 yang sesuai kewenangan daerah, proses perencanaan dan penganggaran, serapan anggaran, maupun pelaksanaan program prioritas tahun 2024.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rencana Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

BUPATI WONOSOBO

ttd

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag